

Judul : Analisa Wakil Ketua Komisi VI tentang perekonomian 2026, pertumbuhan bisa di atas 5,3 persen
Tanggal : Minggu, 04 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Analisa Wakil Ketua Komisi VI Tentang Perekonomian 2026

Pertumbuhan Bisa Di Atas 5,3 Persen

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid meyakini tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional di tengah perlambatan global dan berbagai tantangan struktural dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dua tahun ini relatif stabil di kisaran 5 persen, disertai inflasi yang tetap terjaga.

"Stabilitas ini menunjukkan kebijakan fiskal dan moneter berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat," ujar Nurdin dalam keterangan-nya, Sabtu (3/1/2026).

Nurdin mengingatkan masih adanya persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, ketergantungan impor, hingga kerusakan lingkungan. Tantangan tersebut diperberat oleh kondisi global, di mana pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada di bawah 3 persen hingga akhir 2026 akibat suku bunga tinggi, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan.

Menurutnya, tekanan global itu berdampak langsung pada fluktuasi nilai tukar, arus modal, serta permintaan ekspor Indonesia. Namun demikian, ia tetap

optimistis perekonomian nasional masih berpeluang tumbuh di kisaran 5,1-5,3 persen pada 2026. Proyeksi tersebut berisiko turun jika penguatan ekonomi domestik dan sektor produktif tidak dijalankan secara efektif, sehingga dapat menghambat target pertumbuhan 8 persen pada 2028 sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045.

Karena itu, Nurdin menegaskan tahun 2026 tidak boleh sekadar dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas, tetapi harus menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar pada nilai Ekonomi Pancasila.

Ia juga menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan Visi Asta Cita yang berlandaskan Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Landasan tersebut merupakan kekuatan jati diri bangsa yang pluralistik dan kaya sumber daya alam.

"Kita patut bersyukur karena sejak awal Presiden Prabowo menegaskan Visi Besar Asta Cita akan diwujudkan dengan berpedoman pada Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945," jelas legislator

FOTO FB PRIBADI



Nurdin Halid

asal Sulawesi Selatan itu.

Nurdin memaparkan empat strategi utama penguatan ekonomi ke depan. Pertama, penguatan Koperasi Merah Putih sebagai sistem dasar ekonomi rakyat melalui pembentukan 82 ribu koperasi. Kedua, pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset strategis serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau.

Ketiga, perluasan hilirisasi sumber daya alam hingga 28 komoditas lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Keempat, kolaborasi Koperasi Merah Putih dan Danantara dalam pembiaya-

an, distribusi, serta pembangunan gerai ekonomi desa.

Ia menegaskan, Ekonomi Pancasila tetap relevan sebagai jalan tengah pembangunan nasional, di mana pertumbuhan harus sejalan dengan pemerataan. Koperasi serta UMKM ditempatkan sebagai pilar utama, dengan negara hadir melalui BUMN untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi.

"Tahun 2026 harus menjadi fase konsolidasi menyeluruh, baik dari sisi sistem, kelembagaan, maupun strategi ekonomi, agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai, kinerja perekonomian nasional sepanjang 2025 cukup baik dan resilien di tengah ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB yang berturut-turut mencapai 4,87 persen pada triwulan I, 5,12 persen pada triwulan II, dan 5,04 persen pada triwulan III 2025. "Resiliensi ini ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, investasi, dan ekspor," ujar Puteri.

Ia menambahkan, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi

global oleh Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi 3,2 persen pada 2025 menjadi sinyal positif yang memperkuat optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2025.

Puteri menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari peran berbagai paket stimulus pemerintah. Karena itu, keberlanjutan dan efektivitas stimulus perlu terus diperkuat, terutama yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan kelas menengah.

Selain itu, ia mendorong pengelolaan belanja pemerintah yang lebih terukur dan konsisten agar penyerapan anggaran optimal serta berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan regulator juga diminta terus mendorong pertumbuhan kredit, khususnya bagi UMKM, agar transmisi kebijakan suku bunga benar-benar mendorong sektor riil.

"Dengan pemantauan berkelanjutan dan upaya menurunkan suku bunga kredit, diharapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada APBN 2026 dapat tercapai," tutup Puteri. ■TIF